

## PROVINSI – PEMBENTUKAN

2022

UU No. 16, LN 2022/No. 159, 14 HLM.

### UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

- ABSTRAK** : - Ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. Guna mencapai cita-cita dan tujuan NKRI serta mempercepat pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan Orang Asli Papua di wilayah disebut maka perlu untuk membentuk undang-undang Tentang pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021
  - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: tentang pembentukan Provinsi Papua Tengah yang diberi otonomi khusus beserta kabupaten-kabupaten yang menjadi cakupan wilayahnya. Kabupaten-kabupaten dimaksud adalah Kabupaten Jayawijaya; Kabupaten Pegunungan Bintang; Kabupaten Yahukimo; Kabupaten Tolikara; Kabupaten Mamberamo Tengah; Kabupaten Yalimo; Kabupaten Lanny Jaya, dan Kabupaten Nduga. Turut diatur terkait batas-batas wilayah provinsi, kewajiban pemerintah provinsi terkait rencana tata ruang wilayah, Ibu Kota Provinsi, Pemerintah Daerah/perangkat/aparatur dan aset daerah dan dukungan APBN dan APBD Papua terkait pendanaan pertama kali pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan.

- CATATAN**
1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2022;
  2. Peraturan pelaksana undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini diundangkan;
  3. Peraturan pelaksana dari undang-undang ini secara jenis dan hierarki menyesuaikan dengan peraturan oerundang-undangan yang berlaku dalam Otonomi khusus;